

BAB IV

PERAN PBB DALAM PROSES TERCIPTANYA PERDAMAIAN DI KONFLIK YAMAN

PBB sebagai sebuah organisasi internasional tentu memiliki begitu banyak peran dan pekerjaan yang dapat dilakukan untuk terciptanya dunia yang penuh dengan kedamaian seperti apa yang dicantumkan dalam piagam yang dicetuskan oleh organisasi ini, bahwa salah satu tujuan utamanya adalah untuk menciptakan rasa keamanan bagi negara dunia, salah satu caranya melalui berbagai langkah penyelesaian konflik internasional, salah satunya peran PBB dalam konflik Yaman ini.

Untuk itu, pada bab ini penulis akan menjabarkan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh PBB demi misi utama terciptanya perdamaian di Yaman.

A. Upaya Pencegahan Konflik Yaman oleh PBB

Upaya pencegahan konflik atau *Conflict Prevention* merupakan langkah awal dari terciptanya proses perdamaian dari suatu konflik. Upaya ini merupakan berbagai langkah politis, diplomatis yang dilakukan oleh PBB demi terciptanya perdamaian di konflik Yaman. Selain itu, ciri khas lain dari upaya ini adalah tidak digunakannya upaya kekerasan terutama dengan militer yang proaktif. Hal ini demi terciptanya komunikasi yang lancar dari kedua belah pihak yang bertikai, agar permasalahan tidak berkembang lebih besar lagi.

Pada kenyataannya, semenjak pertama kali ambil bagian di Konflik Yaman, PBB telah begitu banyak mencoba untuk melaksanakan upaya awal ini, ada yang memberikan respon positif terhadap perkembangan konflik, namun tak jarang juga mendapatkan penolakan dan bantahan oleh pihak-pihak yang sedang bertikai. Beberapa upaya diplomatik dan lobi politik yang dilakukan PBB, antara lain:

1. Lobi Diplomatik PBB Terhadap Arab Saudi dan UAE

Seperti yang diketahui bahwa Saudi dan Uni Arab Emirat telah melakukan intervensi politik di Yaman semenjak tahun 2015 silam. Dalam konflik ini, Arab Saudi

dan Yaman menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan rezim Abedrabbo Mansour Hadi sebagai presiden Yaman, terutama tidak lama setelah pemberontak Houthi mulai melakukan penguasaan terhadap ibu kota Sanaa. Akibat pergolakan diantara kedua pihak ini (Arab Saudi dan UAE melawan Houthi) kedua pihak turut mempengaruhi berbagai persoalan yang muncul di kawasan Yaman.

Berbagai serangan yang dilakukan oleh Arab Saudi dan UAE di Yaman telah menciptakan kembali tragedi kemanusiaan besar. Terdapat begitu banyak pesawat tempur kedua negara yang secara terus menerus melakukan serangan rudal dan berbagai tipe bom *cluster*, yang secara langsung menghancurkan infrastruktur dan fasilitas pemukiman yang ada di Yaman. Koalisi ini secara rutin terus melakukan serangan dengan menggunakan bom *cluster* dan fosfor yang dikirimkan oleh Amerika Serikat untuk membunuh dan menghancurkan Yaman (Pars Today, 2018).

Pada 2015 silam, *Amnesty International* menuduh UAE telah melakukan pemasokan senjata dari negara-negara barat dengan nilai mencapai US\$ 3,5 milyar, yang sebagian besar pemasokan senjata digunakan untuk menguasai wilayah pelabuhan utama Hudaydah. Beberapa senjata yang dibeli oleh UAE untuk modernisasi senjata di Yaman antara lain: Senapan berat M-ATV dari AS, MaxxPro dan Caiman dari Rusia, kemudian senapan Zastava MO2 Coyote dari Serbia, Mortir 120mm dari Singapura dan truk baja Agrab dari Inggris (BBC Indonesia, 2019).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO), sampai saat ini hampir 10 ribu orang kehilangan nyawa dan 10 ribu lainnya kehilangan tempat tinggal akibat konflik Yaman yang tak kunjung usai. Bahkan menurut beberapa organisasi pejuang HAM, korban nyawa di kawasan ini justru bisa mencapai lima kali lipat dari data yang telah direkap oleh organisasi internasional lain (Christiastuti, 2017).

Dalam menyelesaikan konflik ini agar tidak semakin membesar, PBB kemudian melakukan beberapa langkah

utama. Yang pertama jelas adalah mencoba untuk bernegosiasi dengan Arab Saudi dan UAE semenjak 2016 silam, melalui keanggotaan kedua negara dalam *United Nations Human Rights Council* (UNHRC).

Selain melaksanakan pendekatan diplomatis melalui UNHRC, PBB melalui utusan khusus kemanusiannya, Lise Grande, beberapa kali turun langsung ke Yaman dan melakukan pendekatan dan penyeruan pengakhiran perang dengan beberapa pimpinan militer Arab Saudi dan UAE semenjak 2017. Lise menjadi tulang punggung dari PBB dalam mendapatkan informasi serta melakukan berbagai penyelidikan independen dan netral terkait kondisi terkini dari Yaman (Pars Today, 2018).

Ketika melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. Dalam pertemuan ini, ada banyak hal yang disampaikan oleh Guterres terkait peluang terciptanya perdamaian dalam beberapak konflik yang melibatkan negara Arab termasuk Arab Saudi. Guterres kemudian menyerukan dihentikannya konflik Yaman terhadap Putra Mahkota Saudi, yang dianggap memimpin koalisi negara-negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab yang melakukan intervensi militer di Yaman untuk mendukung pemerintah Yaman dalam memerangi pemberontak Houthi yang didukung Iran (Hutapea, 2018).

Dengan UAE, lobi-lobi diplomatis juga terus dilakukan oleh PBB. Lobi-lobi ini sedikit banyak terbantu akibat deklarasi UAE yang ingin bergabung bersama Dewan Keamanan PBB di periode 2020 (Kumar, 2017). Seperti yang diketahui bahwa Dewan Keamanan merupakan badan khusus PBB yang memiliki mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Tentu, hal ini tidak dipraktikkan oleh UAE apabila melihat bagaimana peranan mereka dalam konflik Yaman, yang bukan menyelesaikan masalah, namun justru memperburuk keadaan di Yaman. Untuk itu, secara tidak langsung paska deklarasi dan melalui pendekatan yang dilakukan oleh PBB, UAE mulai

menurunkan agresi serangan di kawasan Yaman, terutama di wilayah yang sebelumnya ingin dikuasai oleh UAE yakni wilayah Pelabuhan al-Hudaydah (Pars Today, 2018).

Berbagai upaya diplomatis PBB ini tak jarang berhasil memberikan dampak positif terhadap perbaikan yang terjadi di Yaman. Beberapa kali negosiasi dengan Arab Saudi dan UAE berhasil dilakukan oleh PBB, yang imbasnya diberikannya bantuan oleh kedua negara tersebut untuk pembangunan di Yaman, salah satunya pada tahun 2017 silam. Melalui *King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre*, kedua negara menyalurkan bantuan senilai US\$ 550 juta, untuk berbagai perbaikan di Yaman dan tak ketinggalan untuk suplai pangan di Yaman menyusul data dari PBB adanya 10 juta orang kelaparan di Yaman (Christiastuti, 2017). Bahkan, bantuan ini berhasil naik dua kali lipat pada 2018 dengan total bantuan mencapai US\$ 1,25 miliar.

2. Lobi Diplomatik PBB Terhadap Amerika Serikat

Peran Amerika Serikat (AS) dalam konflik Yaman ini sebenarnya tidak dapat terlihat secara langsung. Namun fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa AS merupakan pendukung koalisi negara Arab dalam memerangi isu terorisme dan pemberontakan di Yaman. AS secara tegas terus mengambil posisi di beberapa kasus untuk membendung Iran dengan Proxy non-negara yang mereka jalankan, misalkan dalam kasus: Hamas di Gaza, milisi Syiah di Irak, Hezbollah di Lebanon dan Suriah, serta pemberontak Houthis di kawasan Yaman (Mata Politik, 2018).

AS memang tidak secara langsung mengumumkan pendanaan terhadap koalisi Arab yang dikomandoi Arab Saudi dan UAE, namun tak bisa dipungkiri pasokan senjata mencapai miliaran dolar yang telah digelontorkan oleh AS, ditambah dengan bantuan intelejen serta fasilitas utama di udara, salah satunya pesawat tak berawak (Mata Politik, 2018).

Untuk itu PBB terus melakukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah AS, terutama dengan hubungan mereka dan negara Arab dalam konflik Yaman. Berkat

komunikasi ini, selain AS mau memfasilitasi pertemuan Guterres dan Pangeran Saudi, AS juga membantu PBB dalam berbagai upaya termasuk mengancam berbagai tindakan yang dilakukan oleh Iran dan sekutunya, karena dianggap mendukung terorisme dan melakukan destabilisasi di Yaman.

AS di era Presiden Donald Trump kemudian secara resmi kembali melakukan sanksi militer terhadap Iran sebagai pemicu kegagalan perjanjian nuklir tahun 2015, ditambah berbagai manuver yang dilakukan oleh Iran di kawasan Timur Tengah, yang dianggap AS sangat berbahaya, terutama akan kepentingan AS disana.

Selain itu, berkat berbagai manuver dan pendekatan yang dilakukan oleh Sekjen PBB, Antonio Guterres, tidak hanya berhasil meluluhkan hati dari petinggi eksekutif AS, namun juga para petinggi legislatif, dalam hal ini para senator. Senat AS mengeluarkan kesepakatan untuk berhenti dalam mendukung pergerakan militer di kawasan Yaman. Terkait keputusan ini, sebanyak 56% senator meminta untuk dihentikannya dukungan untuk koalisi Arab di Yaman, sementara 41% menolak (3% absen). Dalam menyukseskan putusan ini, senat AS menggunakan undang-undang khusus yang diajukan oleh Senator sekaligus Calon Presiden AS 2019-2023, Bernie Sanders, yakni *War Authority Act*. Undang-undang yang telah disahkan semenjak 1973 ini, memiliki tujuan untuk mengontrol dan mengawasi pergerakan presiden AS, apabila keputusannya dianggap membahayakan bagi AS dan konflik bersenjata, terutama apabila mayoritas legislatif tidak menyetujui pyoek tersebut dilaksanakan (BBC Indonesia, 2018).

3. Lobi PBB dengan Kelompok Houthi

Selain menjalankan lobi diplomatik dengan Arab Saudi, UAE dan Amerika Serikat sebagai pihak penyokong kekuatan di Yaman, PBB juga beberapa kali berusaha untuk dapat melaksanakan lobi diplomatik dengan suku Houthi di kawasan Yaman, terutama dengan militan di wilayah Sana'a.

Utusan khusus PBB untuk Yaman, Martin Griffiths tercatat sampai 4 kali berusaha untuk menegosiasikan konflik Yaman dengan kelompok Houthi di Yaman semenjak konflik ini meletus pada 2015. Meskipun pada kenyataannya tidak jarang pertemuan dibatalkan oleh kelompok Houthi karena menganggap PBB masih belum netral terhadap konflik ini, termasuk dalam rencana pertemuan terakhir November 2018 silam (Azzam, 2018).

Lobi yang dilakukan Griffiths memang kerap mendapatkan penolakan dari kelompok Houthi terutama di wilayah kota Sana'a, namun terdapat juga beberapa keberhasilan lobi yang dijalankan. Pada pertemuan November silam, Griffiths meminta dalam rangka persiapan perundingan di Swedia, Houthi mau untuk tidak melakukan berbagai agresi militer, agar perundingan di Swedia tidak akan berakhir dengan sia-sia.

Lobi ini tidak sia-sia, karena paska lobi dan pertemuan antara kedua pihak, kelompok Houthi langsung melakukan penghentian serangan drone dan rudal misil ke kawasan Arab Saudi dan UAE, hal ini bahkan langsung dikonfirmasi oleh Kepala Komite Revolusioner Tertinggi Houthi, Mohammed Ali al-Houthi dalam pernyataan resmi tertulis beberapa hari kemudian (Azzam, 2018).

PBB juga beberapa kali mengambil langkah membantu pasukan Houthi demi terciptanya rasa percaya dari Houthi untuk PBB. Saat terjadi pertempuran di wilayah pelabuhan laut merah, Hodeidah juli silam, PBB mengirimkan pesawat khusus untuk mengangkut setidaknya 50 pasukan Houthi yang luka-luka. Selain mengirimkan pesawat, PBB juga ikut menyertakan 3 dokter dari Yaman dan 1 dokter utusan khusus PBB, untuk membantu para korban setidaknya dapat bertahan sampai pesawat didaratkan di Muscat, Oman. Ini bisa menjadi salah satu alasan kenapa kelompok Houthi kemudian menerima usaha lobi yang diberikan oleh PBB dikemudian hari, setelah berulang kali ditolak.

B. Upaya Perdamaian Konflik Yaman oleh PBB

Konflik Internasional merupakan suatu proses sosial antara dua atau lebih subyek hukum internasional di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Pada dasarnya konflik ini adalah konflik yang dapat mengancam dan mengganggu perdamaian dunia, dan memang sudah menjadi kewajiban PBB untuk ikut andil dalam penyelesaian konflik tersebut, hal ini berkaitan dengan Salah satu keyakinan yang dipegang PBB di dalam menyelesaikan setiap konflik yang ditangani seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB (Suherman, 2003):

“All members shall settle their international disputes by peaceful means in such manner that international peace and security, and justice, are not endangered” (Setiap anggota harus dapat menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai yang tidak membahayakan keamanan dunia).

PBB telah banyak berusaha untuk menciptakan upaya perdamaian antara kelompok pemerintah dan pemimpin militer Houthi. Antara lain:

1. Dialog Nasional Yaman 2015

Pada 10 Februari 2015, PBB memfasilitasi diselenggarakannya dialog nasional yang menghadirkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, terutama oleh pihak yang pro pemerintah dan para pemberontak Houthi. Dialog nasional ini ditujukan untuk menyelesaikan krisis di Yaman yang semakin membesar akibat kelompok Houthi yang mengambil alih kekuasaan pada 2015 silam, dialog nasional juga dihadiri oleh keseluruhan faksi dan partai politik di Yaman.

Kehadiran Houthi dalam dialog nasional yang diselenggarakan di Sana'a ini tidak terlepas dari peran utusan khusus PBB yang dikirim ke Yaman, Jamal Benomar. Jamal secara intensif melakukan komunikasi

dengan berbagai pihak di Yaman, salah satunya dengan pemimpin tinggi Houthi, Abdel Malik al-Houthi.

Perundingan nasional memang terpaksa harus dilaksanakan di Yaman, akibat kondisi Yaman yang saat itu berada dalam situasi berbahaya. 4 hari sebelum dialog dilaksanakan, pemberontak Houthi berhasil membubarkan parlemen di Yaman, dan berencana untuk membentuk parlemen baru di Yaman, menyusul pengunduran diri yang dilakukan oleh Abd Rabbu Hadi (Presiden Yaman) dan Khalid Bahah (Perdana Menteri Yaman). Susunan anggota legilatif negara pun sudah disusun oleh Houthi, dengan total anggota dewan sebanyak 551 anggota.

Ada beberapa agenda pelaksanaan perundingan nasional ini, agenda utamanya jelas pembahasan tentang kudeta konstitusional yang sedang dijalankan oleh Houthi, lalu terkait ketegangan militer yang terjadi di wilayah Yaman Tenggara dan Yaman Selatan. Begitupula tentang meningkatnya sentiment negatif dari separatis di wilayah Maarib, Yaman. Secara khusus dalam dialog ini, melalui utasan khususnya, PBB juga membicarakan tentang peluang Abd Rabbu Mansour Hadi untuk diangkat kembali sebagai presiden, akibat kondisi dalam negari yang bergejolak tanpa adanya pemimpin negara yang sah (Sulistyawati, 2015).

2. Dialog PBB – Koalisi Arab – Kelompok Houthi 2016

Pada bulan april tahun 2016, PBB kembali melaksanakan agenda perundingan. Agenda perundingan ini direncanakan dilaksanakan pada 6 april 2016 oleh PBB bertempat di Kuwait. Namun, dialog ini harus ditangguhkan oleh pemerintah Yaman selama tiga hari sebagai bentuk protes dari pihak pemerintah Yaman atas serangan kelompok Houthi terhadap pangkalan militer pemerintah Yaman di Sana'a (Tanjung Pura Times, 2016)

3. Perundingan Konflik Yaman 2017

Paska meningkatnya konflik diantara kedua negara pada 2015 silam, PBB sebagai organisasi dunia yang memiliki tujuan memelihara perdamaian dunia telah berusaha untuk langsung melaksanakan perundingan di Yaman. Dialog ketiga ini diantara kedua negara bersama PBB dilaksanakan di Sana'a pada oktober 2017. Utusan khusus PBB untuk Yaman, Martin Griffiths sedari awal memang bermohon kepada kedua pihak yang terlibat untuk menghentikan berbagai peperangan yang dapat berdampak buruk bagi Yaman, yang merupakan salah satu negara Arab termiskin (Pars Today, 2018).

Griffiths yang telah sampai di Sana'a saat itu harus pulang dengan tangan kosong, akibat perundingan yang gagal terlaksana. Kegagalan ini disebabkan karena sabotase Arab Saudi dan Koalisi Arab. Meskipun telah menyepakati terjadinya perundingan diantara kedua negara, pada kenyataannya Arab Saudi dan Koalisi Arab tetap melaksanakan serangan, yang semakin menunjukkan sikap koalisi Arab Saudi dan Koalisi Arab yang haus akan perang, akibat sabotase ini proses perdamaian di Yaman semakin tidak memiliki kejelasan. Koalisi Arab secara terus menerus menolak dan justru meningkatkan serangan ke Yaman menyebabkan proses perdamaian menuju ke arah jalan buntu.

4. Perundingan Konflik Yaman 2018

Setelah sempat mengalami stagnansi selama hampir dua tahun, pemerintah Yaman dan pemberontak Houthi kembali menghidupkan peluang untuk terciptanya perdamaian diantara kedua pihak. Beberapa putaran perundingan perdamaian Yaman telah runtuh dalam beberapa tahun belakangan, dimana perundingan sebelumnya pada 2015, 2016, 2017 sempat dilaksanakan, namun tidak menemui solusi terbaik, 2017 sempat akan dilaksanakan gencatan senjata, namun kembali gagal. Perundingan 2018 ini disponsori oleh PBB dan dipimpin langsung oleh utusan khusus PBB

untuk Yaman, Martin Griffiths dan Menteri Luar Negeri Swedia, Margot Wallstrom. (Engel, 2018).

Selain PBB, perundingan ini juga didukung oleh Amerika Serikat (AS). AS kemudian sepakat untuk melaksanakan proses gencatan senjata di Yaman, akibat melihat krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Yaman. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Jim Mattis mendapatkan dukungan di Kongres AS untuk mengurangi bantuan kepada Arab Saudi, yang diperparah oleh pembunuhan wartawan Saudi, Jamal Khashoggi. November 2018, senat memilih untuk memajukan perdebatan tentang penarikan dukungan AS, yang mencakup pembagian intelijen dan penjualan senjata.

Ada beberapa kesepakatan yang disepakati dalam perundingan ini, seperti pertukaran tahanan yang dimiliki kedua pihak, pengembangan proses kepercayaan diantara kedua negara dan tak ketinggalan proses gencatan senjata (Engel, 2018).

Delegasi untuk kedua belah pihak tiba pada desember awal, di Swedia untuk diskusi awal, setelah berbulan-bulan mediasi oleh Griffiths, utusan khusus PBB, yang berupaya untuk menegakkan relevansi komunitas internasional dalam menyelesaikan konflik ini. Houthi dan pemerintah tidak dijadwalkan untuk bertemu dalam perundingan tersebut, yang diperkirakan akan berlangsung selama seminggu, tetapi menginap di tempat yang sama. Baik pemerintah Hadi maupun Houthi telah menunjukkan kecenderungan serius untuk mengakhiri perang.

Kedua belah pihak setidaknya memiliki permintaan khusus sebelum perundingan kedua pihak dilaksanakan. Yaman melalui Menteri Luar Negerinya, Khaled al-Yamani, menyatakan bentuk permintaan yang diinginkan. Yamani mengatakan bahwa pemerintah ingin Houthi untuk menghormati akses kemanusiaan, menarik diri dari kota pelabuhan Hodeidah, dan

membiarkan semua pendapatan dari sana masuk ke bank sentral Yaman.

Untuk bagiannya, Houthi ingin blokade koalisi Saudi di bandara di Sana'a dicabut. Mereka juga menginginkan pasukan pemerintah—yang didukung oleh Uni Emirat Arab—untuk berhenti menyerang Hodeidah. UEA—pendukung utama pemerintah Hadi lainnya—memimpin serangan sengit untuk merebut kembali kota pelabuhan penting tersebut, di mana lebih dari 70 makanan Yaman diimpor.

Perundingan ini juga akan fokus pada isu-isu seperti gaji pekerja pemerintah di daerah Houthi—banyak di antaranya belum dibayar selama dua tahun—dan menyatukan kembali operasi bank sentral, yang dipindahkan pemerintah ke Aden pada tahun 2016 dari Sana'a (Engel, 2018).

Pejabat pemerintah Yaman, Hadi Haig menyatakan jika perundingan berjalan sesuai kesepakatan, maka mereka akan membebaskan sekitar 1,500 hingga 2000 tahanan perang. Pemberontak Houthi juga berjanji akan melakukan hal yang sama, termasuk membebaskan mantan Menteri Pertahanan Mahmoud al-Subaihi dan adik Presiden Abedrabbo Mansour Hadi sekaligus mantan pejabat intelijen senior, Nasser. (Sayaghi, 2018).

C. Upaya Pemeliharaan Perdamaian PBB di Yaman

Upaya ini berupa penggelaran personel di negara/kawasan yang bertikai atas seizin pihak-pihak terkait. Tim PBB mendampingi delegasi pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi dalam pembicaraan informal di kastil Johannesbergs di luar kota Stockholm selama beberapa hari. Upaya membuka pembicaraan perdamaian dari PBB sebenarnya sudah pernah ingin dilaksanakan pada 2016 silam, namun gagal. Termasuk pada september 2018 lalu, ada usaha mempertemukan perwakilan mereka di Jenewa, tetapi gagal, setelah delegasi kelompok Houthi membatalkan rencana pertemuan di Jenewa, Swiss.

Upaya perdamaian PBB di Swedia, berhasil mengeluarkan kesepakatan gencatan senjata oleh kedua pihak. Sebagai langkah awal, rencana itu akan dimulai dengan ikrar gencatan senjata selama 30 hari. Gencatan senjata terutama coba untuk diterapkan di Pelabuhan Hodeidah. Hodeidah adalah pelabuhan terbesar di Yaman yang menjadi tempat masuk sebagian besar bantuan kemanusiaan bagi jutaan warga miskin yang kelaparan. Namun, pihak pemerintah menuding Houthi, yang menguasai fasilitas tersebut, menggunakan pelabuhan yang sama untuk menyelundupkan senjata.

Berdasarkan kesepakatan, semua pelabuhan harus terbuka untuk bantuan kemanusiaan dan juga urusan komersial, obat-obatan, makanan, serta bahan bakar yang dibutuhkan untuk mendistribusikannya. Selain itu bandar udara di Sanaa juga harus dibiarkan terbuka (Aini, 2018).

Untuk memastikan bahwa pemeliharaan perdamaian ini berjalan dengan baik, dengan tidak adanya serangan misil dan drone dari daerah yang dikuasai Houthi ke Kerajaan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, maupun menuju daerah penduduk Yaman, maka PBB kemudian melakukan pemeliharaan perdamaian melalui pengiriman delegasi menuju Hodeidah, Yaman. Tim PBB yang dipimpin oleh Jenderal Purn. Patrick Cammaert asal Belanda, untuk memantau gencatan senjata dan perjanjian yang disepakati pemerintah dan pemberontak Houthi untuk menarik dari kota itu (VOA Indonesia, 2018).

Bahkan PBB berani dan telah diizinkan untuk membawa pesawat carteran PBB menuju bandara internasional Sanaa untuk mengevakuasi korban-korban yang terluka ditemani oleh tiga dokter Yaman dan seorang dokter PBB, dari Sanaa ke Muscat," (Riris, 2018).